

PENGALAMAN UNIVERSITAS MENJALANKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL:KEGIATAN UKM- CENTRE FE-UI

Nining Soesilo
Nining Soesilo (Kepala UKM-Centre FEUI)

Pengabdian pelayanan kepada masyarakat memang merupakan salah satu unsur pelaksana dan penunjang akademik. Pendirian UKM Center di FEUI pada tahun 2005 merupakan salah satu upaya penjabaran pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang juga dilatar belakangi oleh tuntutan integritas moral dan etika. Hal ini dilakukan karena FEUI sudah sejak lama menyadari bahwa usaha kecil mikro (UKM) adalah tulang punggung penggerak roda ekonomi rakyat, yang bergerak pada sektor riil dan merupakan cara yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Telah terbukti bahwa UKM menjadi sektor yang tahan terhadap guncangan perekonomian. Dengan hadirnya UKM Center maka optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki FEUI untuk mengembangkan UKM di Indonesia menjadi semakin besar dan luas jangkauannya. Adapun misi UKM - Center FE-UI adalah: (1).Melakukan pemberdayaan bisnis usaha kecil dan mikro; (2) Mendorong kewirausahaan masyarakat dan kesinambungan bisnis; (3) Membuat advokasi, monitoring dan evaluasi kebijakan.

Peran UKM menjadi makin terkenal seiring PBB telah mendeklarasikan tahun 2005 sebagai Tahun Internasional Microcredit untuk mempromosikan bisnis kecil dan institusi keuangan yang memberi mereka pinjaman dan pelayanan keuangan lain. Tanggung jawab sosial dari UKM Center FEUI dapat dibagi menjadi 5 jenis yaitu yang berbentuk training, penelitian, lomba kewirausahaan, maupun inkubasi bisnis, maupun bentuk kerjasama dengan pemda.

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 152 tahun 2000 maka telah ditetapkan bahwa Universitas Indonesia adalah merupakan Badan Hukum Milik Negara. Keputusan ini dibuat oleh Presiden Republik Indonesia, dengan mempertimbangkan bahwa untuk dapat berperan sebagai kekuatan moral yang memiliki kredibilitas untuk mendukung pembangunan nasional, Universitas Indonesia harus memiliki kemandirian; bahwa Universitas Indonesia telah memiliki kemampuan pengelolaan yang cukup untuk dapat memperoleh kemandirian, otonomi, dan tanggung jawab yang lebih besar; (3) bahwa untuk dapat merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan status hukum Universitas Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara. Pengabdian pelayanan kepada masyarakat memang merupakan salah satu unsur pelaksana dan penunjang akademik, sebagaimana disebutkan dalam pasal 60 Anggaran Rumah Tangga (ART) UI yang telah diterapkan sejak 18 Januari 2003 oleh Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia¹. Selain pengabdian masyarakat, maka tanggung jawab sosial dari Universitas Indonesia dijabarkan secara tidak langsung dalam peran Senat Akademik di baik di tingkat UI² maupun di tingkat Fakultas³ yang memiliki tugas antara lain untuk menjabarkan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Universitas maupun Fakultas; begitu pula Dewan Guru Besar di lingkup Universitas Indonesia⁴ maupun di lingkup Fakultas⁵ dikatakan bahwa mereka juga harus melakukan tugas pembinaan kehidupan akademik, integritas moral, dan etika akademik. Pendirian UKM Center di FEUI pada tahun 2005 merupakan salah satu upaya penjabaran pengabdian masyarakat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang juga dilatar belakangi oleh tuntutan integritas moral dan etika.

PERAN UKM CENTER FE-UI

Sebagai salah satu fakultas yang tertua di Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) sudah sejak lama mengembangkan program pengabdian masyarakat melalui lembaga-lembaga penelitian dan konsultasi yang bernaung di FEUI, seperti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM),

Lembaga Manajemen (LM), Lembaga Demografi (LD), dan Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA). Meskipun ada kegiatan yang ditujukan sebagai upaya pengabdian masyarakat kecil, tetapi umumnya masyarakat selama ini lebih mengenal FE-UI sebagai entitas yang lebih terfokus pada kebijakan makro ekonomi dan manajemen pengusaha skala besar⁶. Padahal dalam krisis yang lalu usaha skala kecil dan mikro terbukti merupakan usaha yang mampu bertahan bahkan lebih bertumbuh.

Oleh sebab itulah program pengabdian masyarakat terutama kepada usaha kecil dan mikro makin menjadi perhatian pokok FEUI. Hal ini dilakukan karena FEUI sudah sejak lama menyadari bahwa usaha kecil mikro (UKM) adalah tulang punggung penggerak roda ekonomi rakyat, yang bergerak pada sektor riil dan merupakan cara yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan. Telah terbukti bahwa UKM menjadi sektor yang tahan terhadap guncangan perekonomian. Pada tahun 2005 telah mulai digodog kemungkinan mengubah nama Fakultas Ekonomi UI menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis- UI (FEB UI), yang mana visinya adalah: "Terwujudnya *knowledge society* FEUI yang berwawasan internasional, peka terhadap kebutuhan bangsa, serta mengedepankan prinsip *good governance*". Salah satu dari 5 misi FEUI adalah Membangun *network* nasional & internasional: partisipasi FEBUI dalam kebijakan perekonomian: kemiskinan & perbaikan iklim usaha⁷

Dengan visi dan misi FEUI yang baru, maka didirikanlah Pusat UKM (UKM Center) pada tanggal 20 Mei 2005 oleh Dekan FEUI berdasarkan SK Dekan No.KPTS/045/D/2005 dan diresmikan tanggal 17 September 2005. UKM Center ini dimaksudkan untuk menyatukan semua kegiatan program pengembangan dan peningkatan UKM yang selama ini tersebar pada lembaga-lembaga di bawah FEUI. Pengabdian masyarakat terutama untuk mengembangkan usaha kecil dan mikro menjadi tugas dan tanggung jawab dari UKM Center. Dengan hadirnya UKM Center maka optimalisasi potensi sumber daya yang dimiliki FEUI untuk mengembangkan UKM di Indonesia menjadi semakin besar dan luas jangkauannya. Adapun misi UKM - Center FE-UI adalah: (1). Melakukan pemberdayaan bisnis usaha kecil dan mikro; (2)

Mendorong kewirausahaan masyarakat dan kesinambungan bisnis; (3) Membuat advokasi, monitoring dan evaluasi kebijakan. Tujuan pembentukan *UKM Center* FEUI adalah terciptanya organisasi unggulan diantara yang sejenis di tanah air yang memakai pendekatan integral, baik dari hulu hilir, horizontal vertical, mikro makro dan berorientasi pada manusia (*people centered*).

Hal ini dilakukan dengan melakukan upaya pemberdayaan usaha kecil dan mikro (UKM) dan dengan cara berperan aktif secara langsung dalam pengembangan usaha mereka sehingga tercapai hasil usaha yang berkelanjutan. Pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil dan mikro (UKM) ini merupakan modal utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang bersifat *people centered*.

OBJEK TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Peran UKM menjadi makin terkenal seiring PBB telah mendeklarasikan tahun 2005 sebagai Tahun Internasional *Microcredit* untuk mempromosikan bisnis kecil dan institusi keuangan yang memberi mereka pinjaman dan pelayanan keuangan lain, yang banyak dikenal dengan nama *microfinance*. Tujuan lebih luas dari penetapan tahun ini adalah memberi perhatian pada peran para pengusaha yang membantu menaikkan peluang ekonomi dari komunitasnya dan memfokuskan pada modal lebih banyak bagi para wirausaha di negara berkembang. Dalam kenyataannya, kondisi pengusaha kecil dan mikro umumnya bersifat tidak formal dan merupakan bisnis transisi. Produktivitasnya pun tergolong rendah, sedangkan tingkat pendidikan/keahliannya juga terbatas. Masalah lain yang ditemui adalah terbatasnya akses ke pendanaan, sering berada dalam kondisi miskin informasi yang diperlukan untuk kemajuan bisnisnya. Masalah lain yang umum ditemui adalah kesulitan dalam melakukan pembukuan internal; miskinnya informasi tentang peluang pasar, sering mengalami kesulitan dalam mencari kualitas input yang baik karena produksinya yang berskala kecil; sering ada kegagalan dalam mengadopsi teknologi serta kemampuannya yang terbatas dalam mengatasi masalah institutional.

DEFINISI UKM

Sebagaimana diatur dalam UU No.9 Tahun 1995 maka Usaha Kecil didefinisikan sebagai usaha dengan kriteria sebagai berikut: (a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha; (b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); (c) dimiliki WNI; (d) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar; dan (e) Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.

Untuk Usaha Menengah (diatur oleh PP 10 Tahun 1999), merupakan usaha dengan ciri-ciri: (a) memiliki kekayaan bersih lebih besar dari RP. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) diluar tanah dan bangunan tempat usaha; (b) Milik WNI; (c) Berdiri sendiri dan bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar; (d) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum dan atau badan usaha yang berbadan hukum. Berdasarkan klasifikasi Skala Usaha, maka menurut BPS yang disebut sebagai Usaha Mikro : adalah usaha yang memiliki tenaga kerja 1-4 orang; adapun usaha Kecil : memiliki tenaga kerja 5-19 orang, sedangkan Usaha Menengah memiliki tenaga kerja 20-99 orang.

DATA DAN KINERJA UKM DI INDONESIA

UKM mempunyai peran yang cukup besar dalam pembangunan ekonomi nasional, hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan hasil survei dan perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi UKM terhadap PDB (tanpa migas)

pada tahun 1997 tercatat sebesar 62,71 persen dan pada tahun 2002 kontribusinya meningkat menjadi 63,89 persen. Sedangkan kontribusi usaha yang berskala besar pada tahun 1997 hanya sebesar 37,29 persen dan pada tahun 2002 turun lagi menjadi 36,11 persen.

Tabel 1. Perbandingan Komposisi PDB (memasukkan komponen migas) menurut Kelompok Usaha tahun 1997 dan 2003 Atas Dasar Harga Konstan 1993 (Miliar Rupiah)

Skala Usaha	TAHUN		% Growth
	1997	2003	
UKM	249.572	259.100	3.82%
Usaha Besar	183.673	185.352	0.91%
	433.245	444.452	2.59%

Jumlah UKM memang jauh lebih banyak daripada usaha besar. Pada tahun 2000 ada sekitar 38,99 juta Usaha Kecil dan 55.061 Usaha Menengah dengan rata-rata penghasilan pertahun antara Rp 1 s/d 50 Miliar. Selain itu, UKM menyerap 55 % dari tenaga kerja. UKM selama ini juga menyumbang 40 % dari PDB nasional (Tulus Tambunan, ISEI). Jumlah unit UKM dalam 3 (tiga) tahun terakhir juga mengalami peningkatan rata-rata sebesar 9,5 persen tiap tahunnya. Pada Tahun 2002 tercatat sebanyak 38,7 juta dan pada Tahun 2004 sebanyak 42,4 juta unit usaha. Peningkatan jumlah unit usaha ini juga diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja disektor UKM. Pada Tahun 2004 jumlah pekerja di sektor UKM tercatat hampir 80 juta orang, dari jumlah tersebut sebanyak 70,3 juta diantaranya bekerja di sektor usaha kecil dan sisanya di sektor usaha menengah. UKM memberi kontribusi sekitar 99 persen dalam jumlah badan usaha di Indonesia serta mempunyai andil 99,6 persen dalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Unit Usaha Tahun 1997, 2000, dan 2003

Skala Usaha	1997	2000	2003	% Growth (00-03)
UKM	39,765,110	38,669,335	42,326,519	9.46%
Usaha Besar	2,097	1,973	2,243	13.68%
	39,767,207	38,671,308	42,328,762	9.46%

PENGALAMAN FEUI MENJALANKAN SOCIAL RESPONSIBILITY

Tanggung jawab sosial dari UKM Center FEUI dapat dibagi menjadi 5 jenis yaitu yang berbentuk training, penelitian, lomba kewirausahaan, maupun inkubasi bisnis, maupun bentuk kerjasama dengan pemda.

1) BENTUK PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN:

PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) BUMN dirancang untuk pemberdayaan masyarakat miskin dan kredit mikro. Bila 2% dari 26 triliun rupiah laba seluruh BUMN untuk modal UKM, maka setiap tahun tersedia 520 milyar rupiah secara *incremental*. Bila tersalur semua, maka sedikitnya 2.600.000 pengusaha kecil akan memperoleh kredit masing-masing 200 juta rupiah/tahun. Nyatanya tidak semua dana ini tersalurkan. Dapat dibayangkan berapa jumlah akumulasi dana ini yang hanya bergentayangan di perbankan⁸. Di lain pihak, bila disimak, maka sebagai contoh, maka ada sebanyak 66.065 orang atau 90.6% pengusaha kecil DKI yang tidak memperoleh kredit perbankan. Angka ini belum termasuk kebutuhan usaha kecil menengah.

Untuk bisa mengupayakan agar pengusaha kecil dan mikro lebih layak memperoleh kredit PKBL, maka telah dilakukan kerjasama antara PT Pupuk Kaltim (PKT) dengan UKM Center FEUI. Kerjasama ini selain mengevaluasi program PKBL Kaltim, juga melakukan berbagai bentuk pelatihan kewirausahaan di Kaltim agar penduduk di sekitar PKT dapat lebih mampu melakukan kegiatan wirausaha sehingga tidak hanya ingin mencari pekerjaan tetapi menciptakan pekerjaan.

Pelatihan yang lain dilakukan di BPD Aceh bagi para pembuat akad kredit di BPD Aceh. FEUI juga telah membuat kolaborasi dengan UKM Center di Unsyah, serta membimbing berdirinya UKM Center sejenis di Aceh. Di bulan Juni 2006 juga telah dilakukan pelatihan para pejabat pembuat akad kredit mikro di Bank Syariah Mandiri seluruh Indonesia dengan UKM Center FEUI yang dilangsungkan di Jakarta

2) BENTUK PENELITIAN: EVALUASI PPMK DKI

Karena adanya krisis ekonomi yang lalu, maka di DKI Jakarta telah dilakukan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PPMK). Ini dilakukan sejak tahun 2001 dan berakhir tahun 2006. Ada tiga pendekatan (Tri Bina) yang dilakukan dan bobot masing-masing yang berbeda yaitu: (1) Ekonomi (minimum 60%); (2) Fisik (maksimum 20%) dan (3) Sosial (maksimum 20%). Pada tahun 2001, telah disalurkan untuk 25 kelurahan di DKI sebesar 2 milyar rupiah/kelurahan. Pada tahun 2002, atas saran DPRD, telah disalurkan ke 242 kelurahan yang belum memperoleh dana PPMK tahun 2001, masing-masing rata sebesar 250 juta rupiah/ kelurahan. Tahun 2003, maka disalurkan masing-masing 500 juta untuk 242 kelurahan. Tahun 2004 telah disalurkan masing-masing 700 juta untuk 242 kelurahan dan selebihnya, masing-masing 250 juta untuk 25 kelurahan. Pada tahun 2005 dilakukan pemberian yang berbeda-beda di kelurahan, yang dihitung sesuai pembobotan, sehingga masing-masing kelurahan menerima dana yang besarnya berkisar antara 850 juta sampai 1,6 milyar per kelurahan. Penyaluran dana PPMK di 267 kelurahan DKI dari tahun 2001 sampai tahun 2005 ini memerlukan suatu bentuk pertanggung jawaban dan evaluasi yang memadai. oleh pihak yang netral (tidak memihak) dan tidak langsung terlibat dalam proses yang telah berlangsung selama ini. Dalam hal ini UKM Center FEUI telah berpartisipasi langsung dalam evaluasi dan menurunkan lebih dari 50 surveyor (baik mahasiswa, para lulusan baru maupun dosen senior) ke masing-masing kelurahan.

Yang dilakukan UKM Center FEUI adalah upaya memberikan gambaran mengenai karakteristik masing-masing kelompok kelurahan berdasarkan *output*, *outcome*, kinerja, manfaat serta dampak positif maupun negatif PPMK yaitu dari bina ekonomi, fisik dan sosial. Kemudian dari masing-masing kelompok kelurahan, maka dapat diperkirakan jenis-jenis mekanisme terbentuknya lembaga keuangan mikro manakah yang paling tepat serta cocok dikembangkan apakah bentuknya koperasi, BMT (Baitulmal wa tamwil), BPR atau kombinasi dari padanya.

3) LOMBA KEWIRAUSAHAAN MIKRO

Melihat besarnya peran pembiayaan mikro dalam penanggulangan kemiskinan, PBB telah mencanangkan tahun 2005 sebagai tahun keuangan mikro internasional. Global Microentrepreneurship Award (GMA) di Indonesia pada tahun 2005 adalah merupakan aktivitas yang merupakan kolaborasi antara Citibank, Citigroup, UNDP, UNCDF dan UKM Center FEUI dalam rangka menyambut Tahun Internasional Keuangan Mikro ini. Ini adalah merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya

Tujuan dari GMA ini adalah untuk memenangkan dukungan dari investor dan donor dengan menekankan pada kontribusi dari UKM, membentuk generasi baru jaringan keuangan mikro (microfinance) yang terdiri dari pimpinan politik, lembaga keuangan, media masa, pelajar, praktisi dan masyarakat umum lainnya, meningkatkan kesadaran mengenai keberadaan keuangan mikro terutama diantara pengusaha kecil yang dapat memperoleh manfaat dari keberadaan keuangan mikro tersebut. GMA juga bertujuan untuk mempromosikan dan mensosialisasikan peran pembiayaan mikro dalam pemberdayaan usaha kecil mikro.

GMA Award adalah sebuah gerakan yang bersifat internasional. Kegiatan tersebut meluas di berbagai negara yang tidak hanya diadakan di Indonesia tetapi juga diadakan di Thailand, Bangladesh, Philipina, negeri-negeri Amerika Latin dan Afrika. Tujuan dari pelaksanaan GMA selain untuk memasyarakatkan fungsi dan peran dari lembaga pembiayaan mikro juga untuk mencari model-model UKM yang sukses dalam pengelolaan kredit mikro-nya, sehingga UKM yang menjadi pemenang GMA Award dapat menjadi contoh bagi UKM lainnya dan menjadi contoh bagi LKM lainnya dalam proses pemberian kredit mikro bagi LKM lainnya. Tahun ini GMA diikuti oleh 402 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Dari 402 orang peserta setelah

diproses datanya telah diperoleh 50 peserta nilai tertinggi yang tersebar diseluruh Indonesia seperti Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, P. Nias, Jawa, Bali dan NTB.

Adapun Lembaga Keuangan Mikro yang ikut juga amat bervariasi, mulai dari Arisan, Bina Swadaya, Swamitra, BRI Unit, BPR, Gema PKM, Binaan Bank Umum, Koperasi Simpan Pinjam, BPD, PKBL, Dinas Koperasi, Lembaga Inkubasi, PPK dan lainnya. Para Peserta GMA ini diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari pejabat pemberi kredit untuk menumbuhkan sistem intermediasi yang lebih lancar dari lembaga keuangan mikro di Indonesia

Pada tanggal 7-8 Desember 2005 para nominator diundang ke Jakarta di Hotel Santika. Mereka diwawancara oleh 6 Dewan Juri dari media, Perbarindo, Gema PKM, Bank Indonesia dan Psikolog. Pada tanggal 8 Desember 2005 telah ditetapkan 9 pemenang untuk 3 kategori yaitu : Aset dibawah 5 juta: (1) Komariah produsen abon ikan (Purwakarta); (2) Siti Murtinah produsen aneka snack (P. Nias); (3) Rosidah produsen makanan simping (Purwakarta). Untuk asset antara 5-50 juta, maka pemenangnya adalah (1) Suwardi pembudidaya ikan gurame (Tulungagung); (2) Hasan Hidayat pengusaha tenun (Pekalongan); (3) Desak Ketut Rai pengusaha klepon (Bali). Untuk asset diatas 50 juta, maka pemenangnya adalah (1) Abdul Rochim pengusaha kripik (Cilegon); (2) Joko Widiarto pengusaha sapi perah (Pangalengan); (3) Henny Hasyim pengusaha bordir (Sidoarjo). Hasil dari GMA Indonesia juga telah dipresentasikan di Beijing, dan dibandingkan dengan kegiatan serupa di negara lain. Mengingat sukses di tahun 2005, maka UKM Center FEU kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan serupa di tahun 2006.

4) BENTUK INKUBASI BISNIS

Lingkungan Universitas Indonesia memiliki danau yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya air tawar. Menilik dari fungsi danau yang ada selain sebagai resevoir air fungsi danau itu sendiri juga berfungsi dari bagian dari taman yang

dikembangkan di UI. Sebagai danau yang lain itu ada pada lingkungan yang jauh dari lalu lintas banyak orang yang letaknya di tengah hutan UI. Ciri danau yang demikian itu dapat dimanfaatkan untuk pengembangan budidaya air tawar sekaligus menjadi tempat pelatihan budidaya perikanan air tawar.

UKM Center melihat peluang yang ada, kemudian berusaha untuk memanfaatkan sebagian potensi yang ada di sebagian danau di UI yang ada sebagai tempat pembelajaran yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan peternak-peternak dalam budidaya ikan dari mulai pembiakan, pembesaran dan pasca panen. Ini dilakukan karena adanya dukungan penuh dari UI, departemen perikanan kelautan dan BUMN untuk memanfaatkan sebagian potensi danau yang ada di UI sebagai pusat pelatihan budidaya perikanan air tawar bagi para petani ikan di daerah Depok dan Parung serta bagi para pengusaha baru di bidang perikanan.

Aktivitas ini merupakan bagian dari UKM Center dalam aktifitasnya dengan Business Development Services (BDS). Target market dari kegiatan tersebut adalah para peternak di sekitar Depok dan Bogor termasuk Parung. Adapun jenis-jenis ikan yang dikembangkan, adalah ikan lele, selanjutnya akan dicoba jenis ikan hias, serta ikan lainnya. Sistem budidaya yang dikembangkan adalah sistem keramba terapung. Dari luas danau yang ada dapat dipergunakan sampai 5 unit jaring apung. Jaring apung yang ada dapat digunakan untuk 3 kegiatan yaitu: (1) kegiatan budidaya; (2) kegiatan pelatihan; (3) kegiatan rekreasi pemancingan

5) BENTUK KERJASAMA DENGAN PEMDA

Bentuk peran tanggung jawab sosial yang telah dijalankan UKM Center FEUI adalah melakukan kerjasama dengan Pemda Tapanuli Selatan yang bupatinya baru saja terpilih. Mengingat bahwa UKM telah dijadikan sebagai ikon pemberdayaan ekonomi rakyat, maka bupati Tapsel telah membuat MOU kerjasama dengan UKM Center FEUI untuk kurun waktu 5 tahun

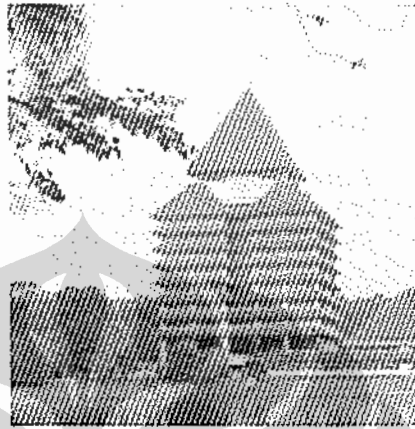
agar bisa menjembatani pemberdayaan UKM di daerah tersebut. Seminar dan Lokakarya (Semiloka) akan secara periodik selama 3 tahun ke depannya. Untuk yang pertama Semiloka I diadakan di Pesantren Darul Mursyid, Simanosor Julu, Kecamatan Saipar Dolok Hole. Semiloka dilaksanakan dari tanggal 8 Juni 2006 sampai dengan 10 Juni 2006.

Adapun permasalahan yang dihadapi UKM di Tapanuli Selatan (Tapsel) adalah masalah mental para UKM, yang umumnya gamang dengan resiko bila usaha dibuat lebih besar, sulit memperoleh tenaga kerja lokal yang mental dan produktivitasnya memadai, permasalahan internal: para UKM sibuk dengan permasalahan diri sendiri. Kalaupun terbentuk asosiasi atau kelompok, maka cenderung berdasarkan kesamaan produk (misalnya koperasi pengusaha pertanian), kemudian juga masalah mentalitas ingin cepat senang, tidak tahan banting (contoh di perdagangan ada kecenderungan menipu timbangan). Masalah lainnya adalah adanya isolasi wilayah, belum terbuka informasi karena lokasi terpencil dan belum memanfaatkan teknologi tinggi (internet) untuk memasarkan. Masalah lain adalah juga berasal dari kenyataan bahwa UKM di Tapsel tersolasi dari informasi mengenai berbagai hal misalnya: aturan bank, pertanahan, aturan perpasaran, birokrasi, perkembangan teknologi. Yang menarik adalah bahwa terjadi konflik batas administrasi (yang dipimpin para camat) dengan batas fungsi (keberadaan bank dan Lembaga Keuangan Mikro). Di sini UKM cenderung bergerak sesuai fungsi, padahal yang mengelola lebih berorientasi pada batas administratif, makanya cenderung mudah konflik. Adapun variasi permasalahan UKM yang umum dijumpai adalah permodalan, pemasaran, manajemen, teknologi, kemitraan dan hukum

PENUTUP

Melalui berbagai kegiatan pengabdian masyarakat, maka UKM Center FEUI memiliki akses terhadap data-data usaha kecil mikro dan data-data Lembaga Keuangan Mikro sehingga suatu saat UKM-Center akan menjadi pusat kajian dalam pembiayaan mikro dan

kemiskinan di Indonesia. Mengingat tugas UKM Center FEUI yang difokuskan pada 3 hal yaitu (1) Inkubasi Bisnis dan Pemberian Penghargaan, (2) Pelatihan dan sertifikasi pendampingan ; (3) Penelitian dan Advokasi, maka baik bagi para pemenang GMA 2005 maupun para pesertanya akan terus ada dalam *network* UKM Center FEUI. Mereka juga akan dijalinan bersama pemenang dari *award-award* lain yang telah diselenggarakan UKM Center FEUI seperti dengan Kantor Deputy Kewirausahaan dan Inovasi Bisnis Pemuda di Kementerian Pemuda dan Olah Raga, juga dengan program PKBL (Program Kemitraan Bina Lingkungan) dari beberapa BUMN (misalnya PT Pupuk Kaltim, PT Rekayasa Industri, Bank Ekspor Indonesia, Reksadana, dan lain-lain) yang telah dan akan bekerja sama dengan UKM Center FEUI. Baik para pemenang maupun para peserta ini akan terus didorong agar terus berkembang baik di bidang administrasi keuangan, perluasan pasar, intensifikasi teknologi, manajemen, teknologi akses ke pembiayaan dan kemitraan serta kepada akses informasi.



Adanya pemenang dan nominator dari sub sektor perikanan misalnya pak Suwardi yang membudidayakan gurame dan pak Marwah Maryanto (salah satu nominator) yang mengupayakan keramba jaring apung ikan nila. Ini juga terus disinergikan dengan ibu Komariah yang membuat abon ikan nila. UKM Center FEUI di sini telah berfungsi sebagai "match maker". Adalah tugas UKM Center FEUI terlebih lanjut untuk mengupayakan akses ke pasar misalnya dengan PT UKM Way atau mengusahakan mereka memperoleh akses kredit dan pemasaran yang lebih besar. Salah satu produk yang diunggulkan untuk dipasarkan adalah minyak kayu putih produksi pulau Buru yang masih murni sehingga bisa diminum. Agenda pengembangan jejaring ini tentu saja menuntut peran dari seluruh pihak yang terlibat. (***)

Referensi:

AD/ART UI

Bahan Presentasi Dekan FEUI Tahun 2004

Fajar Online 4 Agustus 2005, "Kompensasi, Korupsi, dan Neoliberalisme Peraturan Presiden No. 22/2005, tentang kenaikan harga BBM rata-rata 29 persen dan mulai diberlakukan hari Selasa, 1 Maret 2005 pukul 00.00 WIB."

Hafsah, Mohammad Jafar, Dr. Ir , "Upaya Pengembangan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM)", *Infokop* Nomor 25 Tahun XX, 2004

Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta no 1561/2002 tentang "Pedoman Pelaksanaan PPMK dalam rangka Mempercepat Upaya Peningkatan Masyarakat Kelurahan Propinsi DKI Jakarta tahun 2003-2007"

Keputusan Gubernur no 1747/2003 tentang perubahan lampiran Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta nomor 1561/2002.

Mumbunan, Sonny, *Kompas*, January 27, 2004, FSD dan Kekuasaan Negara, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0401/27/opini/821878.htm>.

Murphy, Patricia., and Cunningham, James. *Organizing for Community Controlled Development: Renewing Civil Society*, Sage Publication Inc, New Delhi, 2003

Peraturan Kepala BPM Propinsi DKI Jakarta nomor 439/2005 tentang "Petunjuk Teknis Pengelolaan PPMK di Propinsi DKI tahun 2005"

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 152 tahun 2000 tentang "UI sebagai Badan Hukum Milik Negara".

PP 10 Tahun 1999

Republika, "Ekonomi Politik Kompensasi BBM", 18 Maret 2005

SK Dekan FEUI No.KPTS/045/D/2005 tentang "Pembentukan UKM Center FEUI" tanggal 17 September 2005

Tambunan, Tulus. *Development Of Small And Medium Enterprises In Indonesia*, ISEI and Faculty of Economics, University of Trisakti

UU No.9 Tahun 1995.

Catatan Kaki

- ¹ Lengkapnya disebutkan bahwa salah satunya adalah berfungsi sebagai unsur penunjang akademik di Fakultas mencakup unit-unit kegiatan laboratorium, studio, bengkel, perpustakaan dan unit penunjang yang merupakan perangkat pendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian pelayanan kepada masyarakat pada tingkat Fakultas. Ini dimuat dalam ART-UI dengan Ketua. Mochtar Riady.
- ² Berdasarkan Pasal 29 ART UI
- ³ Tertuang dalam pasal 58 ART UI
- ⁴ Tertuang dalam pasal 35 ART UI
- ⁵ Tertuang berdasarkan pasal 59 ART UI
- ⁶ Di media massa maka ada tuduhan bahwa karena FEUI terutama LPEM sebagai salah satu lembaga yang paling tua di FEUI membuat rekomendasi pencabutan subsidi BBM, maka FEUI dituduh beraliran "neoliberal" (istilah yang dikembangkan dengan nuansa politis)
- ⁷ Adapun misi yang lain adalah keistimewaan layanan akademis : profesionalisme semua pihak, terciptanya budaya akademis yang kuat di kalangan pengajar disertai insentif yang memadai, aktif dalam internasionalisasi UI : model bagi UI sendiri & setara dengan fakultas ekonomi terkemuka di Asean seperti: NUS, University of Philippines, Thammasat University, dan Chulalongkorn University dan terciptanya integrasi FE dengan UI, serta integrasi & kekompakan dalam FEUI: prinsip *good governance* (akuntabilitas, transparansi & partisipasi publik).
- ⁸ Hasil diskusi dengan Bank Ekspor Indonesia, akhir November 2005.